



Implemented by

**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

# PANDUAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

**Disiapkan Oleh:**

Biro Organisasi dan Tatalaksana SETDA Provinsi Sulawesi Selatan Kerjasama Pemerintah Republik Federal Jerman melalui Proyek Kerjasama Indonesia-Jerman (GIZ), program TRANSFORMASI





**PANDUAN**  
**KOMPETISI**  
**INOVASI PELAYANAN PUBLIK**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN 2020**

**Disiapkan Oleh:**

Biro Organisasi dan Tatalaksana SETDA Provinsi  
Sulawesi Selatan Kerjasama Pemerintah Republik  
Federal Jerman melalui Proyek Kerjasama Indonesia-  
Jerman (GIZ), program TRANSFORMASI



## **Tim Penyusun**

H. Syamsul Rizal Syam, SE.MBA

Hj. Andi Mirna, SH

Ir. Fadiyah Machmud, M.Pd

Dra. Roosmala, M.Sc

Retno Setyoningsih, S.IP

Muzzaman Almadani, S.STP, M.A.P


## KATA PENGANTAR

Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan dari pelayanan publik baik berupa ide/gagasan kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan.

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah “Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter”. Untuk mencapai visi tersebut, maka salah satu strategi yang dilakukan adalah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Melalui Biro Organisasi Dan Tatalaksana, untuk ketiga kalinya kompetisi ini akan di gelar. Kompetisi dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Republik Federal Jerman melalui Proyek Kerjasama Indonesia-Jerman (GIZ), Program TRANSFORMASI.

Penyelenggara pelayanan publik di Sulawesi Selatan kembali diberi kesempatan untuk berpartisipasi mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik. Merupakan ajang kompetisi di tingkat provinsi untuk menjangir, menyeleksi dan memberikan penghargaan kepada inovator dan replikator yang memenuhi kriteria penilaian. Kompetisi dilakukan untuk mendorong semangat berinovasi dan menyukseskan Gerakan *One Agency One Innovation* dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan kompetisi, maka buku panduan ini disusun.

Buku Panduan berisikan informasi tentang penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dengan mengacu pada PermenPANRB



Nomor 5 tahun 2019, yakni tema, tujuan, persyaratan inovasi yang di-kompetisikan, penyelenggara dan peserta yang akan ikut kompetisi, serta kriteria dan jadwal Kompetisi. Kompetisi inovasi pelayanan publik dilaksanakan melalui Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Sulsel. Panduan ini juga di lengkapi dengan akun/id peserta dan contoh proposal yang berhasil lolos TOP 45, tahun 2019.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Buku Panduan ini, dan berharap kepada Perangkat Daerah lingkup provinsi dan Kabupaten/kota agar dapat menggunakan buku Panduan ini sebagai acuan dalam menyiapkan proposal inovasi pelayanan publik.

Kepala Biro Organisasi & Tatalaksana  
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

**H. Syamsul Rizal Syam, SE. MBA**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	5
I. PENDAHULUAN .....	6
II. KRITERIA INOVASI, KATEGORI KOMPETISI dan 17 Goals SDGs .....	9
III. PENYELENGGARA, PESERTA, DAN SARANA KOMPETISI .....	25
IV. TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI .....	28
V. SISTIMATIKA PROPOSAL INOVASI .....	31
VI. PENUTUP .....	36
LAMPIRAN .....	37
1. Contoh Proposal Inovasi .....	37

# I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menjadikan inovasi pelayanan publik sebagai visi pemerintahan. Pemerintah bersih dan melayani adalah semboyan penyelenggara pemerintahan yang senantiasa memperhatikan kebutuhan hak dasar masyarakat. *One Agency One Innovation* dijadikan sebagai Gerakan bersama untuk menghasilkan inovasi sebagai budaya kerja. Gerakan yang mewajibkan satu instansi menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun. Salah satu strategi yang di pilih untuk mencapai visi tersebut adalah melalui kompetisi inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik yang baik dan berhasil diharapkan muncul dari persaingan yang sehat antar instansi dan daerah serta memenuhi persyaratan obyektif penilaian sebagai sebuah inovasi. Kompetisi merupakan kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovator dan replikator dari pemerintah lingkup provinsi dan kabupaten/kota dan badan usaha milik daerah. Kompetisi ini dilakukan untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-III, di laksanakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana SETDA Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Lembaga mitra pembangunan seperti TRANSFORMASI, BaKTI, PUSLATBANG KMP LAN RI Makassar dan KOMPAK. Kompetisi melalui Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Sulsel, mempersiapkan inovasi terbaik yang siap berpar-



tisipasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2020. Pada kompetisi kali ini, penilaian bukan saja inovasi yang baru diciptakan, tetapi juga menilai inovasi yang berhasil direplikasi.

Untuk mengetahui tatacara pelaksanaan Kompetisi tersebut, maka diperlukan panduan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu pada PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2019.

## **Tujuan**

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik bertujuan untuk:

1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi inovator yang memenuhi kriteria penilaian dan ditetapkan sebagai Inovasi Pelayanan Publik Sulawesi Selatan;
3. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
4. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik;
5. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran inovasi.

## Persyaratan

Persyaratan inovasi yang dapat diikutsertakan dalam kompetisi adalah:

1. Selaras dengan tema kompetisi;
2. Memenuhi seluruh kriteria inovasi;
3. Relevan dengan salah satu kategori kompetisi;
4. Telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran kompetisi sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi;
5. Diajukan secara online dalam bentuk proposal melalui JIPP Sulsel dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan;
6. Menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan;
7. Belum pernah menerima penghargaan sebagai kategori terbaik (Top 40/Top 35/Top 25/Top 9) Inovasi Pelayanan Publik pada kompetisi periode sebelumnya;
8. Belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik sebanyak 2 (dua) kali, baik secara berturut-turut maupun tidak, pada kompetisi periode sebelumnya.

## Tema

Tema Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah **“Inovasi Pelayanan Publik sebagai Perwujudan Percepatan Reformasi Birokrasi Dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”**

## II. KRITERIA INOVASI, KATEGORI KOMPETISI dan 17 Goals SDGs

### A. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. **Memiliki kebaruan**, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik;
2. **Efektif**, yaitu memperlihatkan hasil yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
3. **Bermanfaat**, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
4. Dapat **ditransfer/direplikasi**, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya;
5. **Berkelanjutan**, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

## **B. Kategori Kompetisi**

9 Kategori Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, yakni:

1. Pengentasan kemiskinan
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Ketahanan Pangan
5. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
6. Pemberdayaan Masyarakat
7. Pelayanan Publik Responsif Gender
8. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, dan
9. Tata kelola Pemerintahan

## **C. 17 GOALS SDGs**

Inovator perlu mengetahui 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan – Sustainability Development Goals (SDGs), guna memastikan inovasinya berkontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs. Adapun 17 Goals berdasarkan PERATURAN PRESIDEN RI NO 59 TAHUN 2017 adalah sebagai berikut:

NO	17 GOALS	SASARAN
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	1. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
		2. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
		3. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro
		4. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
		2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
		3. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
		2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.
		3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

		4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
		5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
		6. Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
		7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
		8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	<p>1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</p> <p>2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</p>

		3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas
		4. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan
		5. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.
		2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
		3. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
		4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
		5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.



6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
		2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
		3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
		4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
		5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
		6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern.
		2. Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global.

		3. Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat angka perbaikan efisiensi energi global.
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	<p>1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang</p> <p>2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.</p>
		3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
		4. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
		5. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
		6. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anakanak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.

		7. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
		8. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
		9. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
		2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
		3. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.

10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
		2. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.
		3. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.
		4. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.
		2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.
		3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.

		4. Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.
		5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan
		6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
		7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	1. Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.
		2. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
		3. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.

		4. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.
		5. Meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	<p>1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.</p> <p>2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.</p>
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	<p>1. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.</p> <p>2. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.</p> <p>3. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.</p>

		<p>4. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization</p>
15	<p>Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, Menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati</p>	<p>1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</p> <p>2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.</p> <p>3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.</p>
		<p>4. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.</p>
		<p>5. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.</p>

		6. Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.
		7. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	<p>1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimana pun.</p> <p>2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak</p> <p>3. Menggalakkan kedaulatan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.</p> <p>4. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.</p> <p>5. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</p>
		6. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
		7. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
		8. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.



17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	<p>1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</p> <p>2. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.</p>
		<p>3. Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.</p>
		<p>4. Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan terarah di negara-negara berkembang untuk mendukung rencana nasional guna melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan triangular.</p>
		<p>5. Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda</p>

		6. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.
		7. Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.
		8. Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.
		9. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.
		10. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
		11. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

# III. PENYELENGGARA, PESERTA, DAN SARANA KOMPETISI

## A. Penyelenggara Kompetisi

1. Penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan ke-III adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana SETDA Prov. Sulsel. Penyelenggara bertugas memfasilitasi proses pelaksanaan kompetisi;
  - a. membentuk Tim admin, dan Tim Panel;
  - b. mengumumkan hasil kompetisi; dan
  - c. menominasikan proposal untuk selanjutnya mengikuti kompetisi KIPP Tahun 2020.
2. Dalam menjalankan tugas, unsur-unsur penyelenggara yang terdiri dari Tim Admin dan Tim Panel wajib menjunjung tinggi prinsip integritas.
3. Penetapan Tim Admin dan Tim Panel dengan Keputusan Gubernur.

## B. Tim Admin

1. Adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Prov Sulsel;
2. Melakukan seleksi administrasi
3. Membuat dan membagikan ID pengguna

4. Melakukan kompilasi penilaian Proposal yang berasal dari Tim Panel

Tim Admin adalah Bagian Ketatalaksanaan, Biro Organisasi & Tata-laksana Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### **C. Tim Panel Independen**

1. Melakukan penilaian proposal inovasi pelayanan publik yang lolos seleksi administrasi;
2. Melakukan penilaian presentasi dan wawancara
3. Melakukan verifikasi lapangan.

Tim Panel, masing-masing berasal dari unsur:

1. TRANSFORMASI
2. TGUPP
3. STIA LAN RI Makassar
4. PSLATBANG KMP LAN RI di Makassar
5. Yayasan BaKTI
6. KOMPAK Sulsel

### **D. Peserta Kompetisi**

1. Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing mengirimkan maksimal 3 proposal inovasi; dan
2. Kabupaten/kota dengan mengirimkan 10 proposal inovasi pelayanan publik terbaik yang telah melalui proses seleksi di kabupaten/kota.

## E. Sarana Kompetisi

Sarana yang digunakan dalam proses kompetisi adalah JIPP Sulsel, dengan Alamat situs yaitu **[jipp.sulselprov.go.id](http://jipp.sulselprov.go.id)**

## IV. TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI

### A. Tahapan Kompetisi

**Tahapan kompetisi terdiri dari:**

#### 1. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi dilaksanakan untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan Kompetisi dan memberikan penguatan materi tentang Inovasi Pelayanan Publik. Peserta Rapat Koordinasi adalah OPD Lingkup Provinsi dan Bagian Organisasi dari 24 kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan.

#### 2. Pengajuan Proposal

Proposal di kirim ke [jipp.sulselprov.go.id](http://jipp.sulselprov.go.id). Untuk mengaksesnya, masing-masing innovator menggunakan akun/id yang telah dibagikan tersendiri oleh panitia

#### 3. Penilaian

**Tahapan penilaian terdiri atas:**

##### a. Seleksi Administrasi

Tim Admin akan menyeleksi Proposal yang masuk. Memeriksa kelengkapan proposal berdasarkan Sistimatika penulisan dan kelengkapan dokumen pendukung. Proposal yang memenuhi persyaratan administrasi kemudian diteruskan ke Tim Panel.

## **b. Penilaian Proposal**

Penilaian lanjutan proposal dilakukan oleh Tim Panel. Proposal yang diterima dari Tim Admin, selanjutnya akan dinilai oleh Tim Panel. Komponen penilaian mencakup substansi proposal dan hasil presentasi dan wawancara. Tim Panel juga akan melakukan Verifikasi dan Observasi Lapangan.

## **c. Penentuan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan**

Pleno penentuan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan oleh SETDA Bersama Tim Panel dan Penetapan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

## **4. Penghargaan**

Penghargaan diberikan kepada :

1. Inovator yang berhasil mengimplementasikan Inovasi Pelayanan Publik
2. Replikator yang berhasil melakukan replikasi Inovasi Pelayanan Publik

## B. JADWAL DAN TAHAPAN KOMPETISI

### JADWAL KIPP PROVINSI 2020

NO	WAKTU*)	AGENDA	KETERANGAN
1	13 Oktober 2019	Batas Akhir Pengusulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik kepada Tim Admin melalui <a href="http://www.jipp.sulselprov.go.id">www.jipp.sulselprov.go.id</a>	Tim Admin JIPP Sulsel
2	14 - 19 Oktober 2019	Seleksi Administrasi	Tim Admin JIPP Sulsel
3	22 Oktober 2019	Rapat Koordinasi Tim KIPP Provinsi 2020	Tim Admin dan Tim Penilai
4	23 Okt. - 2 Nov. 2019	Penilaian/evaluasi proposal	Tim Panel/Penilai
5	4 - 5 Nov. 2019	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Proposal	Tim Admin JIPP Sulsel
6	7 - 8 Nov. 2019	Rapat Pembahasan Penentuan Top 50 Inovasi Pelayanan Publik	Tim Admin dan Tim Penilai
7	13 - 16 Nov. 2019	Presentase Dan Wawancara Proposal Inovasi Pelayanan Publik	Tim Panel/Penilai
8	18 - 29 Nov. 2019	Verifikasi Lapangan	Tim Admin dan Tim Penilai
9	3 Desember 2019	Rapat Pembahasan Hasil Penilaian Presentasi/wawancara dan Verifikasi Lapangan	Tim Admin dan Tim Penilai
10	5 Desember 2019	Pleno Penentuan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik	Sekda dan Tim Panel/Penilai
11	Januari 2020	Penetapan Keputusan Gubernur Sulsel Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi	Tim Admin JIPP Sulsel
12	Februari 2020	Pemberian Penghargaan KIPP Provinsi 2020	

\*) *Jadwal Tentatif*,



# V. SISTIMATIKA PROPOSAL INOVASI

## FORMAT PROPOSAL DAN DOKUMENTASI INOVASI

Proposal dan dokumentasi Inovasi disusun berdasarkan format PER-MENPANRB No 5 Tahun 2019, sebagai berikut:

### Ringkasan

.....  
.....  
.....sedikitnya mencakup “Masalah, Solusi, Hasil & Dampak”.....

NO	ASPEK YANG DINILAI	DESKRIPSI	PERTANYAAN KUNCI
1	Tujuan inovasi (Bobot 5%)	<ul style="list-style-type: none"><li>Gambarkan/Jelaskan tujuan (“gagasan”) munculnya inovasi ini.</li><li>Maksimal 200 kata.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Apa masalah yg dipecahkan (dukungan data)</li><li>Urgensi masalah, mengapa sekarang, (data, referensi)</li></ul>
2	Keselarasan dengan kategori yang dipilih (Bobot 5%)	<ul style="list-style-type: none"><li>Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih.</li><li>Maksimal 100 kata.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengapa inovasi mendukung salah satu kategori</li></ul>

3	Signifikansi (Arti Penting) (Bobot 15%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inovasi tersebut harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu anak-anak, perempuan, orang tua, orang cacat, dll.) dalam konteks negara atau wilayah Anda.</li> <li>• Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan publik di wilayah Anda.</li> <li>• Maksimal 200 kata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalau inovasi tidak dibuat apa yg terjadi (arti pentingnya inovasi)</li> </ul>
4	Inovatif (Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian) (Bobot 20%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks wilayah Anda.</li> <li>• Maksimal 100 kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keunikan</li> <li>• Terbosan inovasi</li> <li>• Apa bedanya inovasi ini dgn yg sudah ada</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain.</li> <li>• Maksimal 100 kata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yg diadaptasi apanya (ide, teknis, manajemen)?jelaskan</li> <li>• Pembedanya apa?jelaskan</li> <li>• Durasi waktu replikasi</li> </ul>

5.	Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/ atau terbukti telah diterapkan dan diadaptasi (d disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah atau unit lain)</li> <li>• Jika ya, jelaskan di mana dan bagaimana prosesnya.</li> <li>• Maksimal 100 kata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Hambatan” pelaksanaan</li> <li>• Daya dukung (regulasi, SDaya, MoU)</li> <li>• Jumlah sebaran replikasi ....</li> </ul>
6.	Sumber daya dan keberlanjutan (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya) yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut?</li> <li>• Langkah-langkah/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/ menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal?</li> <li>• Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia?</li> <li>• Maksimal 100 kata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dukungan Rp....</li> <li>• Bagaimana di peroleh (APBD, CSR..)</li> <li>• Tim terlatih dengan tugas .....?</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan).</li> <li>• Maksimal 200 kata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana dukungan masyarakat terhadap inovasi,</li> </ul>

7.	Dampak (Bobot 15%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah inovasi ini telah dievaluasi. secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal, misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan. Ya Tidak</li> <li>• Jika ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Target/kelompok sasaran;</li> <li>b. Kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran;</li> <li>c. Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran; perbaikan proses bisnis; kolaborasi antarsatuan unit kerja/ perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas).</li> </ol> </li> <li>• Maksimal 100 kata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah inovasi ini sudah dievaluasi dampaknya (target/ klp sasaran; klp masy luar, aspek tata pemerintahan instansi)</li> <li>• Siapa yang melakukan evaluasi</li> <li>• Caranya bagaimana (kuesioner, survei, rapat, lokakarya,dll)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu.</li> <li>• Maksimal 100 kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator apa saja yg digunakan (contoh: inovasi menurunkan AKI, a.l. luasnya cakupan, frekuensi kunjungan, jumlah AKI)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut?</li> <li>• Maksimal 100 kata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambaran hasil evaluasi dari indicator yang digunakan.</li> </ul>

8	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan kerja sama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini.</li> <li>• Maksimal 200 kata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siapa saja dan apa peran masing-masing.</li> </ul>
9	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas.</li> <li>• Maksimal 100 kata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa yang dirasakan setelah inovasi, apakah pekerjaan semakin mudah atau bagaimana, jelaskan.</li> </ul>

## Dokumen pendukung

1. Video, menggambarkan situasi sebelum dan setelah inovasi di laksanakan, sedikit pernyataan pejabat dan penerima manfaat ; durasi 3 menit
2. Kliping koran, pemberitaan tentang inovasi, Peraturan yang dihasilkan : PERDA, Perbupm SK, Rencana Aksi, SOP Pembiayaan dsb.
3. Foto-foto (terkait langsung dengan proses pelaksanaan inovasi - bukan foto bersama/rombongan atau selfi)



## **VI. PENUTUP**

Demikian Buku Panduan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

Semoga bermanfaat.

## Lampiran 1

# Proposal LABORATORIUM INOVASI BERBASIS KEMITRAAN

### Kota Makassar

Tanggal pelaksanaan inovasi pelayanan publik : Tuesday, 17 January 2017

Kategori inovasi pelayanan publik : Tata kelola Pemerintahan

### Ringkasan Proposal

*Laboratorium Inovasi yang terbentuk sejak tahun 2017 hingga saat ini merupakan kegiatan pendampingan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Perusahaan Daerah (Perusda) lingkup Kota Makassar dalam kerangka memberikan pemahaman terhadap ide atau gagasan yang akan dieksplorasi dalam melahirkan inovasi. Inovasi tersebut menjadi salah satu solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pada pemberian pelayanan publik. Kegiatan Advokasi Laboratorium Inovasi dimaksudkan agar penyelenggaraan menjadi lebih efektif sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan serta bahan monitoring dan evaluasi di masa mendatang.*

*Laboratorium Inovasi Daerah adalah satu program pendampingan yang dibangun untuk menumbuhkembangkan inovasi dari dalam birokrasi pemerintah daerah melalui proses konsultasi hingga bimbingan teknis dalam serangkaian proses memunculkan inovasi SKPD. Melalui Kegiatan Advokasi Laboratorium Inovasi Daerah Kota Makassar mendorong pemerintah daerah untuk menghasilkan ide dan karya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun sasaran dari kegiatan advokasi laboratorium Inovasi adalah tumbuhnya kapasitas berinovasi yang ditandai dengan terwujudnya ide dan karya inovasi secara nyata,*

*bermanfaat dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Fungsi Laboratorium Inovasi Kota Makassar adalah sebagai : Lokasi/tempat diskusi; Coaching Clinic; Analisis dan Pengembangan Inovasi; Formulasi lahirnya calon inovasi baru; serta membangun strategi peningkatan kualitas inovasi.*

*Laboratorium Inovasi Daerah Kota Makassar mereplikasi Laboratorium Inovasi Lembaga Administrasi Negara secara konsep dengan melakukan serangkaian proses/tahapan yang dikenal dengan nama 5 D inovasi, dimana setiap proses/tahapan memiliki tujuan dan metode tersendiri yang saling bersinergi untuk menghasilkan inovasi SKPD. 5 D Laboratorium Inovasi merupakan akronim dari Drum up, Diagnose, Design, Delivery dan Display. Melalui 5 (lima) langkah ini, Pemerintah Kota Makassar memunculkan berbagai inovasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan pelibatan penta helix yaitu Pemerintah, Akademis, Bisnis, Media, dan Komunitas sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kapasitasnya dalam upaya memenuhi tuntutan lingkungan strategis.*

## **1. Tujuan Inisiatif**

***Pertanyaan : Gambarkan/Jelaskan tujuan inisiatif (“gagasan”) munculnya inovasi ini***

Penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap kaku, strukturalis membuat para penyelenggaranya terkesan tidak berani mengembangkan kreativitas dalam menjalankan kerja-kerja organisasi. Kondisi ini dibutuhkan suatu wadah dalam membuka cakrawala berpikir menghadapi era saat ini yang mengedepankan inovasi sehingga diperlukan untuk membentuk Laboratorium Inovasi.

Laboratorium inovasi, saat ini dilengkapi dengan ruangan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam mengembangkan kreativitas yang kemudian menjelma menjadi living lab yang bernilai komersil dan dapat menjadi wadah masyarakat untuk bisa menjadi entrepreneur. Laboratorium inovasi juga bekerjasama dengan UNDP-Yayasan



Bakti-Pulse Lab Jakarta, LAN, dan Kemenristekdikti serta lembaga perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar. Dengan adanya laboratorium inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kepada SKPD, Perusda, dan stakeholder lainnya terkait pemrosesan, implementasi, pengembangan, dan keberlanjutan inovasi.

Kegiatan Advokasi Laboratorium Inovasi dimaksudkan agar penyelenggaraan menjadi lebih efektif sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan serta bahan monitoring dan evaluasi di masa mendatang.

## **2. Keselarasan Dengan Kategori Yang Dipilih**

***Pertanyaan : Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih.***

Jawaban:

Penyelenggaraan pemerintahan yang ada saat ini membutuhkan terobosan-terobosan yang dapat mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pengembangan kreativitas (inovasi). Laboratorium inovasi hadir guna memfasilitasi penyelenggara pemerintahan dan stakeholder dalam melahirkan inovasi, baik dalam kerangka mendukung kinerja pemerintahan daerah maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang prima.

Hadirnya laboratorium inovasi sebagai wadah dalam menstimulasi atmosfer atas kelahiran inovasi yang dapat mengatasi kendala-kendala terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan. Inovasi tersebut diarahkan selain untuk tereselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, juga untuk peningkatan layanan publik serta meningkatkan daya saing daerah melalui akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

### 3. Signifikansi (Arti Penting)

***Pertanyaan : Jelaskan bagaimana inisiatif ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/ kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan publik di suatu negara atau wilayah tertentu. Inisiatif tersebut harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu anak-anak, perempuan, orang tua, orang cacat, dll.) dalam konteks negara atau wilayah Anda.***

Jawaban:

Laboratorium Inovasi merupakan program yang bersifat pendampingan, asistensi, dan fasilitasi terhadap penumbuhkembangan semangat dan aksi nyata dalam berinovasi. Program ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan inovasi di instansi pemerintah. Hal tersebut dipandang perlu karena sektor publik merupakan salah satu sektor yang paling diharapkan, khususnya sektor publik di daerah yakni pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Ini karena titik berat pembangunan dan pelayanan publik kini berada di daerah seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Dengan sektor publik yang inovatif, maka pelayanan publik menjadi semakin baik, masyarakat semakin berdaya, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Pada akhirnya, daya saing daerah dan kesejahteraan warga pun semakin meningkat.

Laboratorium inovasi merupakan pendampingan bagi SKPD dan Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Makassar serta berbagai komunitas di kalangan masyarakat, berupa kegiatan workshop penyusunan inovasi yang didasarkan pada kategori tata kelola pemerintahan daerah pelayanan publik, dan atau inovasi daerah lainnya yang diawali dengan penggalian gagasan atau ide sampai pada display inovasi dengan melibatkan UNDP, Yayasan Bakti, Pulse Lab Jakarta dan Kemenristekdikti melalui pendekatan Lab. Inovasi Kemitraan, Lab. Inovasi Desain Kola-

borasi, Lab. Inovasi Iteratif Kebijakan, dan Lab. Inovasi Transformasi.

#### **4. Inovasi**

***Pertanyaan : Jelaskan mengapa inisiatif ini inovatif dalam konteks negara atau wilayah Anda.***

Melalui Kegiatan Advokasi Laboratorium Inovasi Daerah Kota Makassar mendorong pemerintah daerah untuk menghasilkan ide dan karya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun sasaran dari kegiatan advokasi laboratorium Inovasi adalah tumbuhnya kapasitas berinovasi yang ditandai dengan terwujudnya ide dan karya inovasi secara nyata, bermanfaat dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Fungsi Laboratorium Inovasi Kota Makassar adalah sebagai : Lokasi/ tempat diskusi; Coaching Clinic; Analisis dan Pengembangan Inovasi; Formulasi lahirnya calon inovasi baru; serta membangun strategi peningkatan kualitas inovasi.

***Pertanyaan : Jelaskan apakah inovasi ini asli atau apakah itu merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain.***

Laboratorium Inovasi Daerah Kota Makassar mereplikasi Laboratorium Inovasi Lembaga Administrasi Negara secara konsep dengan melakukan serangkaian proses/tahapan yang dikenal dengan nama 5 D inovasi, dimana setiap proses/tahapan memiliki tujuan dan metode tersendiri yang saling bersinergi untuk menghasilkan inovasi SKPD. 5 D Laboratorium Inovasi merupakan akronim dari Drum up, Diagnose, Design, Delivery dan Display. Melalui 5 (lima) langkah ini, Pemerintah Kota Makassar memunculkan berbagai inovasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan pelibatan penta helix yaitu Pemerintah, Akademis, Bisnis, Media, dan Komunitas sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kapasitasnya dalam upaya memenuhi tuntutan lingkungan strategis.

## 5. Transferabilitas

**Pertanyaan : Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan diadaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya negara atau wilayah lain) ? Jika ya, tolong jelaskan di mana dan bagaimana prosesnya**

Adapun tahapan Laboratorium Inovasi meliputi :

### 1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode paparan diskusi, uji coba, training dan Benchmarking dipandu moderator, narasumber dari kalangan akademisi serta pemaparan rencana program oleh Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Daerah dan Teknologi pada Balitbangda Kota Makassar.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Laboratorium Inovasi :

1. Tim koordinasi Tim kegiatan kemitraan laboratorium inovasi (coaching clinic)
2. Tim kegiatan kolaboratif laboratorium inovasi (workshop)
3. Tim kegiatan iteratif kebijakan laboratorium inovasi (ujicoba inovasi)
4. Tim kegiatan show innovation/lomba inovasi daerah :
  - Sosialisasi,
  - Pendaftaran, Verifikasi, Pengumuman, Technical Meeting,
  - Lomba inovasi.
  - Tim kegiatan capacity building (training)

## 6. Sumber Daya

**Pertanyaan : Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya) yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut?**

***Pemangku kepentingan lain mana di dalam institusi yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam memunculkan dan melaksanakan inisiatif ini?***

***Langkah-langkah/strategi apa yang dilakukan inovator dalam memobilisasi/ menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal?***

***Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia?***

Terlaksana dan berhasilnya inovasi pelayanan publik ini didukung oleh sumber daya sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia, Sub Bagian Perencanaan beserta staf pada 63 SKPD sebagai pencetus<sup>1</sup>. Inovasi di tiap SKPD yang melakukan inovasi yang difasilitasi oleh Balitbangda Kota Makassar Finansial<sup>2</sup>.

Tahun 2019 pada DPA Balitbangda pada Kegiatan Advokasi Laboratorium Inovasi telah dianggarkan anggaran sebesar Rp.1.427.000.000,00- (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah)

Langkah-langkah/strategi yang dilakukan untuk dapat memobilisasi seluruh sumber daya Manusia tiap<sup>1</sup>. SKPD untuk terus berinovasi dengan adanya arahan Bapak Walikota Makassar bahwa tiap SKPD wajib mengeluarkan 1 Inovasi per SKPD tiap tahunnya

***Pertanyaan : Jelaskan apakah dan bagaimana inovasi ini berkelanjutan (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi dan yang berhubungan dengan lingkungan).***

Penyelenggara pelayanan publik baik dari unsur pemerintahan daerah maupun perusahaan daerah (Perusda) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, saat ini dituntut untuk berakselerasi mengikuti perkembangan zaman dengan segala kemajuan dan kecanggihan teknologi serta memenuhi kebutuhan masyarakat atau kita kenal dengan era in-

dustri 4.0. Era ini membutuhkan terobosan atau inovasi yang dapat dijadikan solusi dalam menghadapi tantangan dan hambatan terutama pada penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan dari Pemerintah Kota Makassar yang menekankan one agency one innovation tentunya membutuhkan suatu wadah dalam rangka melahirkan inovasi, mengelola inovasi, mengembangkan inovasi, dan bahkan mereplikasi inovasi sesuai dengan konten lokal yang berlaku di Kota Makassar.

Kegiatan Advokasi Laboratorium Daerah Kota Makassar dengan menghadirkan narasumber yang akan melahirkan Inovasi baru ataupun mereplikasi inovasi sesuai dengan konten lokal yang berlaku di Kota Makassar yang di sesuaikan tiap SKPD yang dapat memperlancar program dan kegiatan tiap SKPD selaku pelayan masyarakat yang pastinya akan bermanfaat positif dan dapat secara langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat Kota Makassar. Inovasi-Inovasi yang diciptakan itu dipergunakan untuk menambah income perkapita masyarakat Kota Makassar, Dan untuk memonitoring keberlangsungan inovasi ini maka dibuatkan group Whatsapp (WA) untuk sebagai wadah komunikasi dan interaksi bagi seluruh SKPD dalam pengembangan inovasi Kota Makassar.

## **7. Dampak**

*Pertanyaan : Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan.*

Jawaban: Ya

*Pertanyaan Jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada:*

Target/kelompok sasaran. Kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran. Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya, tingkat akunta-

bilitas).

Sejak berdirinya Laboratorium Inovasi Tahun 2017 sampai saat ini telah melahirkan 185 Inovasi Kota Makassar yang beberapa diantaranya berhasil menjuarai lomba-lomba inovasi baik skala nasional maupun internasional, seperti Home Care dan Longset di Bidang Layanan Kesehatan meraih penghargaan Sinovik Kemenpan-RB Tahun 2017 dan Penghargaan Internasional UNPSA Tahun 2018, Pasikola di Bidang Transportasi meraih penghargaan internasional di bidang smart city kategori smart mobility of transportation di Taipei (Taiwan) serta juara 1 ajang Co : Creation Competition C-GEN Indonesia Tahun 2018, serta Dongkel di Bidang Perpustakaan meraih penghargaan Sinovik Kemenpan-RB Tahun 2017 dan juara 2 dalam penghargaan Innovative Government Award Tahun 2018.

***Pertanyaan : Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu.***

Indikator : Nilai tambah sektor manufaktur (MVA) sebagai persentase terhadap PDB

Dengan adanya Kegiatan Advokasi Laboratorium Inovasi diharapkan inovasi yang dilahirkan oleh SKPD dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Hal ini dapat memperlancar perekonomian dan menambah Pembangunan yang hakikatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara berbagai dimensi, baik dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

***Pertanyaan : Gambarkan/apa hasil evaluasi tersebut?***

Sejak berdirinya Tahun 2017, Laboratorium Inovasi Daerah Kota Makassar telah mengikuti kompetisi:

1. Innovative Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 menyertakan 14 Inovasi berhasil Juara 3 dan Tahun

2018 menyertakan 75 Inovasi berhasil Juara

2. Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2017 menyertakan 33 Inovasi berhasil masuk TOP 99 dan Tahun 2018 menyertakan 44 Inovasi

## **8. Keterlibatan Pemangku Kepentingan**

*Pertanyaan : Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi inovasi ini.*

Laboratorium Inovasi disebut Berbasis Kemitraan karena dalam melakukan fasilitasi terhadap penyelenggara pemerintahan dan stakeholder melibatkan berbagai pihak yang menjadi mitra dalam pengembangan inovasi. Dengan keterlibatan berbagai pihak kelompok penerima manfaat dalam hal ini penyelenggara pemerintahan dan stakeholder mendapatkan transfer knowledge utamanya yang berkaitan dengan inovasi. Penerima manfaat tersebut terbantu dengan adanya Inovasi ini.

Selama tahun 2017-2018 laboratorium inovasi berfokus pada SKPD dan Perusda lingkup Kota Makassar dalam mendampingi penyusunan proposal inovasi mulai dari membangun konsep ide/gagasan, kemudian dilakukan analisis kebutuhan akan inovasi, setelah itu mendesain ke dalam bentuk kelahiran inovasi, lalu mendeliver dengan melakukan launching dan evaluasi inovasi. Tahun 2019, Laboratorium Inovasi memfasilitasi tidak hanya lagi SKPD dan Perusda lingkup Kota Makassar, melainkan melebarkan pada triple helix, yakni SKPD, Akademisi, dan Masyarakat (LSM). Seluruh SKPD wajib membuat 1 Inovasi tiap tahunnya yang difasilitasi Balitbangda melalui Laboratorium Inovasi Daerah Kota Makassar yang akan membantu tiap SKPD dalam melahirkan Inovasinya yang juga dalam Laboratorium Inovasi ini disiapkan juga Narasumber dari kalangan akademisi seperti UNHAS, UNM, dan



Universitas lainnya, LAN Makassar, Kemenristekdikti dan LSM dalam negeri maupun luar negeri yang bergerak dalam Inovasi seperti BAKTi dan UNDP telah diadakan MOU kerjasama dengan pihak Balitbangda Kota Makassar dalam melahirkan terus Inovasi baru yang berkelanjutan.

## **9. Pelajaran Yang Dipetik**

***Pertanyaan : Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan khususnya inovasi yang membuat inovasi ini hebat, yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas.***

Adanya Laboratorium Inovasi Daerah Kota Makassar sebagai wadah munculnya inovasi baru seluruh SKPD Kota Makassar. Selain itu dalam perjalanan Laboratorium Inovasi telah ditorehkan prestasi berupa penghargaan kepada Walikota Makassar, Bapak Moh. Ramdhan Pomanto sebagai Walikota Terinovatif untuk yang ketiga kalinya mulai dari tahun 2014-2016. Semua ini baru langkah awal dari banyak agenda inovasi yang akan dilalui oleh Kota Makassar untuk tahun-tahun mendatang dengan memfasilitasi seluruh SKPD di daerahnya maupun di daerah lain yang melakukan benchmarking ke Pemerintah Kota Makassar terkait Inovasi-Inovasi yang dilahirkan untuk bahan referensi daerah lain dalam menghasilkan inovasi baru yang telah diperbaharui sesuai konten lokal masing-masing.

### Kontak Person

Retno Setyoningsih : 0811-443-089, rethnos@gmail.com

Muzzaman Almadani : 0822-2108-8860, muzzaman84@gmail.com